

# BPP

## BADAN PENGARAH PERCEPATAN BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP RI)

PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PAPUA CERDAS**

LAPORAN BULANAN (*MONTHLY REPORT*) - APRIL 2026



RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)  
TAHUN 2025 (SUMBER BPS):

**8,07**



ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)  
TAHUN 2025 (SUMBER BPS):

**57,63**



PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT



Papua Cerdas, Papua  Indonesia Maju!

# RAPAT KOORDINASI & KONFERENSI KERJA

## PROGRAM PRIORITAS KEMENDIKDASMEN

### PGRI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

"Guru Bermutu, Indonesia Maju, Guru Hebat Indonesia Kuat"



**PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS BEBAS DARI KORUPSI (ZIWBK)**

📅 29-31 Maret 2026 📍 Sorong, Provinsi Papua Barat

**KONFERENSI KERJA PGRI**  
**PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026**

Dibuka oleh: **MARTEN KOCU, S.H, M.H**  
(Staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan)

**KORUPSI (ZIWBK) TA**



Serah Terima Sertifikat dan Komitmen Bersama



Proses Penandatanganan Pencanangan ZIWBK Tahun 2026



Ketua PGRI Provinsi Papua Barat,  
Bapak Elimeleck Woyoi, S.Pd



Sambutan Ketua Umum PB PGRI  
(Daring)



Penandatanganan  
Nota Kesepahaman



Sesi Presentasi Kerja



Ruang Pertemuan Utama  
Lt. 3 Kantor Gubernur



Peserta Konferensi Kerja XXIII



Sambutan Kepala BGTK Provinsi Papua Barat



**BADAN PENGARAH PERCEPATAN**  
**BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN**  
**OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP RI)**

PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PAPUA CERDAS**

LAPORAN BULANAN (MONTHLY REPORT) - APRIL 2026

### SINERGI UNTUK PAPUA CERDAS

RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)  
TAHUN 2025 (SUMBER BPS)

**8,07**

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)  
TAHUN 2025 (SUMBER BPS)

**57,63**

### REKOMENDASI STRATEGIS KONFERENSI KERJA PGRI



PENINGKATAN  
KOMPETENSI  
GURU DIGITAL



PENGUATAN  
JARINGAN  
ORGANISASI  
KABUPATEN/KOTA



ADVOKASI  
KESEJAHTERAAN  
& PERLINDUNGAN  
HUKUM GURU



GERAKAN  
LITERASI &  
NUMERASI  
KONTEKSTUAL  
PAPUA



KOLABORASI  
DAN SINERGI  
SEMUA  
PEMANGKU  
KEPENTINGAN

**PAPUA CERDAS, PAPUA MAJU, INDONESIA MAJU!**

# POKOK-POKOK PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI STRATEGIS

Rapat Koordinasi Program Prioritas Kemendikdasmen – BGTK Provinsi Papua Barat dan Konferensi Kerja PGRI Provinsi Papua Barat Tahun 2026



**RAPAT KOORDINASI PROGRAM PRIORITAS KEMENDIKDASMEN**  
Bersama BGTK Provinsi Papua Barat

29–31 MARET 2026

KOTA SORONG



**KONFERENSI KERJA PGRI PROVINSI PAPUA BARAT**

6–7 APRIL 2026

KANTOR GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT



Pelaksanaan Rapat Koordinasi Program Prioritas Kemendikdasmen bersama BGTK Provinsi Papua Barat di Kota Sorong tanggal 29–31 Maret 2026 serta Konferensi Kerja PGRI Provinsi Papua Barat tanggal 6–7 April 2026 di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat menghasilkan sejumlah pokok permasalahan strategis dan rekomendasi kebijakan pendidikan di Tanah Papua.

1

## KETIMPANGAN MUTU SDM PENDIDIKAN DAN KESEJAHTEeraan GURU



### PERMASALAHAN

Masih terjadi kesenjangan kompetensi guru, kepala sekolah, serta mutu hasil belajar peserta didik antara wilayah perkotaan dan daerah 3T di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Selain itu, kesejahteraan, perlindungan hukum, dan kepastian status guru honorer maupun PPPK belum optimal.

### REKOMENDASI STRATEGIS



Penguatan kapasitas guru dan kepala sekolah melalui pelatihan berkelanjutan berbasis kebutuhan wilayah adat Papua.



Pengembangan Akademi Guru Digital Papua, pelatihan AI, coding, dan pembelajaran mendalam.



Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan profesi guru melalui afirmasi tunjangan daerah khusus dan regulasi perlindungan guru.



Penguatan komunitas belajar dan organisasi profesi guru sebagai pusat pengembangan SDM pendidikan.

2

## KETERBATASAN INFRASTRUKTUR DAN TRANSFORMASI DIGITAL PENDIDIKAN



### PERMASALAHAN

Transformasi digital pendidikan belum berjalan optimal akibat keterbatasan akses internet, perangkat TIK, listrik, serta hambatan geografis. Di sisi lain, kemampuan literasi, numerasi, dan penguasaan teknologi peserta didik masih rendah.

### REKOMENDASI STRATEGIS



Percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan digital melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kominfo, PLN, dan Telkom.



Penyediaan internet dan perangkat TIK untuk sekolah terpencil melalui skema afirmasi khusus Papua.



Penguatan laboratorium komputer, pembelajaran hybrid, serta pelatihan digital, AI, dan coding bagi guru dan siswa.



Penguatan gerakan literasi dan numerasi berbasis budaya dan kearifan lokal Papua.

3

## LEMAHNYA SINKRONISASI TATA KELOLA PENDIDIKAN DAN PENGUATAN KARAKTER PESERTA DIDIK



### PERMASALAHAN

Masih terdapat tumpang tindih program pusat dan daerah, lemahnya sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi pendidikan, serta belum optimalnya pendidikan karakter di tengah pengaruh negatif perkembangan sosial dan media digital.

### REKOMENDASI STRATEGIS



Sinkronisasi program pendidikan pusat dan daerah melalui roadmap pendidikan Papua Barat 2026–2030.



Pembentukan forum koordinasi dan Dewan Pendidikan Kolaboratif Papua Barat berbasis data terpadu.



Penguatan zona integritas, digitalisasi layanan pendidikan, dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.



Penguatan pendidikan karakter berbasis budaya Papua melalui penanaman nilai disiplin, toleransi, nasionalisme, dan kepedulian sosial dengan guru sebagai teladan utama.

NILAI-NILAI UTAMA



Beriman & Bertakwa



Berkarakter Pancasila



Kolaboratif



Inovatif



Berkelanjutan

PENDIDIKAN BERMUTU,  
PAPUA MAJU,  
INDONESIA MAJU!





**BPP**

BADAN PENGARAH PAPUA

# TERIMA KASIH

Atas perhatian, dukungan, kerja sama,  
dan komitmen kita untuk pendidikan yang lebih  
berkualitas di **Tanah Papua**.



*Papua Cerdas, Papua Maju,  
Indonesia Maju!*



**BERSINERGI**  
Membangun kolaborasi  
untuk kemajuan Papua



**BERKOMITMEN**  
Berkomitmen pada  
pendidikan berkualitas



**BERINOVASI**  
Berinovasi untuk solusi  
yang berkelanjutan



**BERDAMPAK**  
Berdampak nyata bagi  
generasi Papua

Badan Pengarah Papua

# LAPORAN BULANAN POKJA PAPUA SEHAT

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua  
Perwakilan Papua Barat

---

APRIL 2026



# 1 ASPEK PERENCANAAN

*Sinkronisasi program pembangunan daerah dengan RIPP, RAPP 2025–2029, dan kebijakan nasional Otonomi Khusus Papua.*

P.1

## Musrenbang Otsus Kabupaten Pegunungan Arfak TA 2027

📅 1 April 2026 📍 Aula Yosmar, Kantor Bupati Pegar



Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) Kabupaten Pegunungan Arfak dalam rangka Penyusunan Perencanaan Program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2027. Irene Manibuy selaku Anggota BP3OKP Perwakilan Papua Barat menyampaikan arahan bahwa dana Otsus bukan sekadar anggaran yang diberikan negara, melainkan instrumen keberpihakan negara kepada Papua. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan bukan seberapa besar anggaran yang diserap, melainkan seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Pegunungan Arfak. Empat arah kebijakan ditekankan: prioritaskan Orang Asli Papua, gunakan pendekatan berbasis data (bukan kira-kira), sinkronisasi dengan RAPP dan perencanaan daerah, serta jamin transparansi dan akuntabilitas.

Program Prioritas Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Sehat: Peningkatan Rumah Sakit Tipe D menjadi Tipe C Papua Cerdas: Pengembangan sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan akselerasi mutu pendidikan di wilayah Arfak Papua Produktif: Pengembangan ekonomi lokal berbasis kakao dan pengembangan kota kecil Di anggi Infrastruktur: Peningkatan infrastruktur konektivitas, akses sistem pengolahan air limbah, dan mitigasi bencana

✓ **Capaian:** Kabupaten Pegunungan Arfak jadi yang pertama Musrenbang Otsus TA 2027 di Papua Barat; program OPD tersinkronisasi dengan arah RIPP dan RAPP.

P.2

## Rapat Tindak Lanjut Tata Kelola Dana Otsus Papua Barat

📅 8 April 2026 📍 Ruang Rapat BPP, GKN Lt. III, Manokwari



Pertemuan ini merupakan Tindak lanjut pada pertemuan 25–26 Maret 2026 di Jakarta. Membahas tata kelola, kewenangan kelembagaan, perencanaan, dan pengawasan Dana Otsus Papua Barat. Identifikasi ketidakjelasan nomenklatur program Otsus dalam sistem perencanaan daerah.

Merujuk pada hasil pertemuan 25–26 Maret 2026, BP3OKP Perwakilan Papua Barat mengingatkan seluruh pihak bahwa momentum perbaikan tata kelola Otsus tidak boleh berhenti di forum diskusi. Setiap kesepakatan yang telah dihasilkan harus segera diterjemahkan menjadi langkah aksi nyata dengan target waktu yang jelas, penanggung jawab yang ditunjuk, dan indikator keberhasilan yang terukur. BP3OKP juga menggarisbawahi pentingnya pelibatan masyarakat dan tokoh adat dalam proses evaluasi program Otsus sebagai bentuk akuntabilitas publik yang sesungguhnya. Kepercayaan masyarakat Papua Barat terhadap pengelolaan Otsus hanya dapat dipulihkan melalui transparansi, konsistensi, dan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan di lapangan.

✓ **Capaian:** Teridentifikasi masalah nomenklatur program Otsus; disepakati langkah perbaikan tata kelola alokasi Dana Otsus Papua Barat.

# 1 ASPEK PERENCANAAN

Sinkronisasi program pembangunan daerah dengan RIPP, RAPP 2025–2029, dan kebijakan nasional Otonomi Khusus Papua.

P.3

## Rapat Kerja Pemrov Papua Barat bersama Bupati se-Papua Barat

📅 16 April 2026 📍 Hotel Aston Niu, Manokwari

Rapat Kerja Pemrov Papua Barat bersama seluruh Bupati. BP3OKP memberikan arahan agar semua kabupaten menyelesaikan Musrenbang Otsus sebelum Musrenbang Provinsi, melibatkan DPR/MRP/BP3OKP, dan menjaga keselarasan dengan RIPP & RAPP.



✓ **Capaian:** Seluruh kabupaten mendapat arahan resmi wajib Musrenbang Otsus lebih dahulu; data masuk SIPP; RIPP & RAPP jadi acuan wajib. Hasil kesepakatan Penandatanganan berita acara rapat kerja bupati seprovinsi papua barat 2026 Pada hari ini Kamis 16 April 2026

P.4

## Rapat Sinkronisasi BP3OKP – Gubernur Provinsi Papua Barat

📅 20 April 2026 📍 Ruang Rapat Gubernur Provinsi Papua Barat

Rapat koordinasi strategis membahas tiga program prioritas Provinsi Papua Barat: Papua Cerdas (pendidikan & ketenagakerjaan), Papua Sehat (layanan kesehatan), dan Papua Produktif (pengembangan ekonomi). Sinkronisasi kebijakan pusat–daerah dalam kerangka RAPP 2025–2029.



✓ **Capaian:** Capaian tahun pertama Papua Cerdas meningkat; kemitraan Polda Papua Barat untuk pelatihan satpam lulusan; Disnaker survei 100 perusahaan.

# 1 ASPEK PERENCANAAN

*Sinkronisasi program pembangunan daerah dengan RIPPP, RAPP 2025–2029, dan kebijakan nasional Otonomi Khusus Papua.*

P.5

## Musrenbang Otsus & RKPD Kabupaten Teluk Bintuni TA 2027

📅 23–24 April 2026 📍 Gedung Sasana Karya, Teluk Bintuni

Musrenbang RKPD 2027 dan Otsus Kab. Teluk Bintuni. Satu-satunya kabupaten dari 7 yang menghadirkan Direktur Bappenas: memaparkan PSN Bintuni (Tangguh, kawasan industri, pelabuhan dalam) dan RAPP 2025–2029. Anggota BP3OKP perwakilan Provinsi Papua Barat menekankan bahwa keberhasilan tidak seharusnya hanya diukur dari penyerapan anggaran, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Ia juga menyoroti kondisi fiskal saat ini yang menuntut penggunaan setiap rupiah secara lebih selektif dan optimal, serta mencatat bahwa daerah-daerah termasuk Papua Barat masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ibu Irene Manibuy menyoroti kapal rumah sakit terapung di Teluk Bintuni sebagai pencapaian luar biasa dalam rencana percepatan pembangunan Papua. Dia mencatat bahwa dari semua kabupaten, hanya Bintuni yang memiliki kapal berwarna putih ini. Kapal tersebut menyediakan layanan kesehatan lengkap, termasuk operasi dan bantuan persalinan, dengan dokter, obat-obatan, dan fasilitas medis yang memadai.



✓ **Capaian:** Mendapat penghargaan Kemenkeu; PSN Tangguh & kawasan industri tersinkronisasi dalam RKPD 2027.

P.6

## Musrenbang Otsus Kabupaten Teluk Wondama TA 2027

📅 24–25 April 2026 📍 Kabupaten Teluk Wondama

Musrenbang Otsus TA 2027 Kab. Teluk Wondama. Membahas program prioritas berbasis Dana Otsus, perlindungan Lansia, dan semangat perdamaian-persatuan 23 tahun kabupaten. Berpedoman pada PP No. 106 dan PP No. 107.



P.7

## Desk Musrenbang Otsus & RKPD Kabupaten Teluk Bintuni

📅 24 April 2026 📍 Gedung Sasana Karya, Teluk Bintuni

📌 Lanjutan Musrenbang: verifikasi program dan kegiatan bersumber Dana Otsus TA 2027 bersama tim teknis BP3OKP dan OPD terkait. Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian utama adalah tata kelola keuangan daerah. Irene menyoroti bahwa hingga saat ini, daerah di Papua masih sangat bergantung pada Dana Transfer Pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih terlalu kecil. Padahal, wilayah Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, BP3OKP bersama MRP dan DPRD mengusulkan adanya kebijakan khusus turunan dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Salah satu usulan strategis adalah agar Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otsus dikembalikan sepenuhnya menjadi PAD. Meskipun mengakui adanya asas perimbangan keuangan nasional, Irene berharap regulasi khusus dapat segera direvisi agar kue pembangunan dapat dinikmati secara maksimal oleh keenam provinsi di Papua sesuai dengan sumber daya yang dihasilkan dari bumi Papua sendiri. Aspirasi Masyarakat Sederhana namun Penting

## 2 ASPEK PENGANGGARAN

Memfasilitasi efektivitas pengelolaan Dana Otsus dan Transfer ke Daerah (TKD) agar transparan, efisien, dan tepat sasaran.

### A.1 Rapat Program Penugasan Khusus Tenaga Medis & Kesehatan OAP

📅 April 2026 📍 Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

Pertemuan dengan Kabid Yankes membahas "Program Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan OAP" sebanyak 392 orang (termasuk 6 dokter spesialis) dari Kemenkes RI. Pembahasan mekanisme penugasan ke Puskesmas dan RS Papua Barat.

#### ✓ Capaian:

disepakati beberapa hal :1.Menindak lanjuti surat dari Menri kesehatan akan ada pertemuan internal antara BP3OKP. dan Dinas Kesehatan PROV.pb sebelum melapor kepada gubernur PB.2.setelah pertemuan dengan gubernur akan diadakan FGD bersama dinas kesehatan provinsi ,BPJS dan kepala2 dinas kesehatan se PROV.pb. 3.Menugaskan kepala2 dinas kesehatan kabupaten utk mendata anakOAP yg berprofesi sebagai Perawat,bidan dan dokter spesialis



*Makna Strategis — BPP Papua Barat memperkuat perannya sebagai penghubung fiskal daerah, memastikan Dana Otsus terserap tepat sasaran dan tenaga kesehatan OAP terdistribusi merata.*

### 3 ASPEK PELAKSANAAN

Keterlibatan langsung BPP mendampingi program prioritas nasional dan kebijakan Otsus di lapangan.

L.1

#### Audiensi Program Pendidikan PKBM Yayasan Kasih Rumbai Koteka

📅 10 April 2026 📍 Aula Kasuari, GKN Lt.III, Manokwari

Audiensi Yayasan Kasih Rumbai Koteka bersama lintas instansi. Yayasan mengelola PKBM melayani peserta dari berbagai latar belakang termasuk putus sekolah. Membahas dukungan program, akreditasi, dan integrasi dengan program Makan Bergizi Gratis. Rapat menyepakati langkah-langkah konkret ke depan: penguatan administrasi yayasan, pengembangan kurikulum vokasi, sertifikasi satpam dan otomotif berstandar nasional, MOU dengan SMK lokal, menginventarisir seluruh PKBM yang ada di Papua Barat, hingga rencana ekspansi PKBM ke kabupaten-kabupaten dengan angka putus sekolah tertinggi. Ibu Irene Manibuy menyampaikan program penyaluran lulusan Pendidikan ABC dengan focus pada peningkatan mutu, pengawasan kurikulum, dan kolaborasi multi- stakeholder untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif dan siap kerja



L.3

#### Kunjungan Kerja Monitoring Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)

📅 13 April 2026 📍 Dapur MBG, Jl. Kanguru Amban, Manokwari

Respons atas laporan tertulis masyarakat mengenai penurunan kualitas lingkungan akibat operasional Dapur MBG Yayasan Ash Shidiq Prafi Mulya. Dampak: pencemaran air sumur, polusi udara, gangguan kenyamanan warga, serta gangguan Kesehatan. BP3OKP verifikasi lapangan dan koordinasi penyelesaian masalah agar MBG berjalan tanpa mengorbankan kesehatan lingkungan. POKJA Papua Sehat segera melakukan relokasi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) ke titik yang aman dan memenuhi standar jarak dari sumber air warga, serta memastikan seluruh aspek operasional dapur mematuhi ketentuan teknis yang telah ditetapkan, termasuk persyaratan jarak minimal 20 meter dari permukiman dan bebas dari potensi polusi serta limbah berbahaya.

✅ **Capaian:** Terverifikasinya aduan masyarakat; disusun rekomendasi penyelesaian masalah lingkungan dapur MBG.



### 3 ASPEK PELAKSANAAN

#### L.2 Tinjauan Lapangan PKBM Rumbai Koteka

📅 11 April 2026 📍 Yayasan Rumbai Koteka, Sanggeng, Manokwari

*Keterlibatan langsung BPP mendampingi program prioritas nasional dan kebijakan Otsus di lapangan.*

Kunjungan lapangan ke PKBM Rumbai Koteka untuk memantau langsung program pendidikan. Peserta banyak dari kalangan putus sekolah (kehamilan usia sekolah, masalah keluarga). BP3OKP mendorong integrasi PKBM dengan program nasional.

✔ **Capaian:** Terverifikasinya kondisi lapangan PKBM; rekomendasi penguatan program disusun sebagai dasar advokasi ke pemerintah pusat.



### 3 ASPEK PELAKSANAAN

Keterlibatan langsung BPP mendampingi program prioritas nasional dan kebijakan Otsus di lapangan.

#### L.4 Forum Ekonomi Papua Barat Produktif & Perdamaian

📅 15 April 2026 📍 Aula Kasuari, GKN Lt.III, Manokwari

Audiensi Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian (dibentuk Desember 2025, tindak lanjut kunjungan Wakil Presiden RI). Membahas terobosan terukur dan kolaboratif dalam implementasi Otsus untuk penguatan ekonomi masyarakat, selaras visi Papua Emas 2041. FGD tersebut digelar sebagai bagian dari upaya BP3OKP dalam mendorong program Papua Produktif, yang merupakan salah satu misi pembangunan Papua di bawah visi Papua sejahtera, mandiri dan berkeadilan. Selain menjadi ruang diskusi, forum ini juga bertujuan merumuskan langkah-langkah terobosan yang terukur, terintegrasi dan kolaboratif guna memastikan implementasi otonomi khusus benar-benar berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat.



✓ **Capaian:** Terbentuknya forum kemitraan ekonomi lintas OPD; tersusunnya langkah terobosan ekonomi lokal berbasis potensi Papua Barat.

#### L.5 Kunjungan Pengungsian Masyarakat Muskona Utara – Teluk Bintuni

📅 25 April 2026 📍 Tempat Pengungsian Muskona Utara, Teluk Bintuni

Audiensi dan kunjungan langsung ke komunitas pengungsi dari Distrik Muskona Utara dan Muskona Utara Jauh, Kabupaten Teluk Bintuni. Respons langsung terhadap krisis kemanusiaan akibat penembakan pada 11 Oktober 2025 antara pasukan TNI dan KKB yang menyebabkan evakuasi massal penduduk dua distrik di wilayah tersebut. BP3OKP memastikan kebutuhan dasar pengungsi dan mendorong koordinasi antar-instansi.

Empat isu utama yang dibahas: (1) tuntutan penarikan seluruh pasukan keamanan sebagai syarat kepulangan; (2) distribusi dana Otsus yang tidak menyentuh komunitas sejak 2020; (3) pendidikan darurat anak pengungsi dengan berbagai kendala administratif dan transportasi; (4) layanan kesehatan yang kritis — tidak ada dokter sejak 2017, malnutrisi ibu hamil dan anak. Irene Manibuy berkomitmen melaporkan semua kekhawatiran ini langsung ke Wakil Presiden dan memfasilitasi pertemuan tingkat tinggi Bupati–Gubernur–Wapres. Pertemuan ditutup dengan komitmen konkret: pengumpulan data kerusakan infrastruktur, koordinasi transportasi sekolah, penambahan tenaga bidan, penyelesaian masalah PIP dan KTP ganda, serta advokasi perubahan regulasi untuk distribusi dana Otsus langsung ke tingkat desa.



✓ **Capaian:** Teridentifikasi kebutuhan mendesak pengungsi; disusun rekomendasi koordinasi lintas kementerian untuk penanganan dan pemulihan masyarakat.

## 4 ASPEK PENATAUSAHAAN (TATA KELOLA)

*Penguatan sinkronisasi internal, akuntabilitas, dan koordinasi antarlembaga dalam penyelenggaraan Otsus Papua.*

T.1

### Rapat Persiapan Internal – Sinkronisasi Sebelum Audiensi Gubernur Papua Barat

📅 9 April 2026 📍 Ruang Rapat BPP, GKN Lt.III, Manokwari



Rapat persiapan internal BP3OKP bersama pemangku kepentingan sebelum beraudiensi dengan Gubernur Papua Barat. Tiga agenda: (1) kondisi terkini Papua Barat, (2) Kartu Papua Barat Produktif & skema pembiayaan, (3) Forum Ekonomi Papua Barat Produktif & Perdamaian. BP3OKP memastikan dukungan penuh terhadap kedua program forum.

✓ **Capaian:** Tersinkronisasinya posisi seluruh pemangku kepentingan; agenda Kartu Papua Barat Produktif dan Forum Ekonomi siap dipresentasikan ke Gubernur.

### Catatan Tata Kelola & Koordinasi April 2026

Seluruh kegiatan Musrenbang Otsus wajib diinput ke SIPPP sebelum penetapan APBD. BP3OKP Papua Barat berperan sebagai koordinator yang memastikan kesesuaian nomenklatur program Otsus dengan RIPP dan RAPP 2025–2029 (Perpres 107/2025). Musrenbang Otsus di Pegaf, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama merupakan bagian dari siklus perencanaan terpadu yang dikawal penuh oleh BP3OKP.

*Identifikasi tantangan dan peluang intervensi strategis di bidang kesehatan Papua Barat.*

## 1 Kendala Pembangunan

- Angka stunting masih tinggi 15–30%, jauh di bawah target nasional 14%
- Penyakit menular (malaria, TB, HIV, sifilis) masih tinggi di hampir semua kabupaten
- Cakupan imunisasi dasar lengkap masih rendah dan tidak merata
- Pemenuhan SDM kesehatan baru 40–60%; banyak puskesmas tanpa tenaga kesehatan (contoh: Puskesmas Tahota)
- Beberapa puskesmas tidak memiliki akses air bersih
- Akses layanan kesehatan dan distribusi logistik terhambat geografis dan biaya transportasi tinggi
- Beberapa RS kabupaten masih bertipe D (contoh: Teluk Bintuni bagian tertentu)
- Kebutuhan layanan rujukan tinggi; pasien harus dirujuk ke luar Papua

## 2 Permasalahan Daerah / Sumbatan

- Anggaran kesehatan provinsi berkurang: dari Rp3,5T (2025) → Rp2,5T (2026); Dana Otsus Papua turun dari >Rp12T → >Rp10T
- Realisasi program tidak sebanding penyerapan anggaran — anggaran jadi dokumen, bukan capaian nyata
- Transfer Dana Otsus bidang kesehatan sering tersendat; koordinasi lintas OPD belum maksimal
- Cakupan Universal Health Coverage (UHC); MoU BPJS belum disepakati, data kepesertaan tidak sinkron
- Keberpihakan OAP dalam akses layanan dasar di 3T masih lemah
- Sinkronisasi data dan pelaporan masih lemah
- Insentif tenaga kesehatan di daerah 3T rendah; aspek keamanan tenaga kesehatan mempengaruhi kinerja
- Akses transportasi dan logistik sulit → keterlambatan distribusi obat dan layanan kesehatan

Capaian program dan peran aktif BPP dalam memperkuat layanan kesehatan Papua Barat.

## 3 Capaian / Kegiatan yang Sudah Dilakukan

- Rapat Program Penugasan Khusus 392 tenaga medis & kesehatan OAP (termasuk 6 dokter spesialis) dari Kemenkes RI — April 2026
- Koordinasi dengan Kabid Yankes Dinas Kesehatan Provinsi: skema penugasan ke Puskesmas dan RS Papua Barat disepakati
- Pendampingan OPD dalam Musrenbang Otsus: program kesehatan (KIA, Gizi, Imunisasi, Malaria, HIV) masuk prioritas Musrenbang Pegaf, Bintuni & Wondama
- Kunjungan monitoring Dapur MBG: respons langsung terhadap laporan pencemaran lingkungan kesehatan (Manokwari, 13 Apr)
- Evaluasi realisasi Dana Otsus bidang kesehatan dalam Musrenbang dan Raker Pemprov–Bupati
- Advokasi alokasi anggaran kesehatan minimum 20% dalam RKPD 2027 (forum konsultasi publik RKPD Papua Barat, Maret 2026)
- Mengidentifikasi puskesmas tanpa tenaga kesehatan dan tanpa air bersih sebagai prioritas intervensi

## 4 Peran BPP dalam Membuka Sumbatan

- Koordinasi langsung dengan Kemenkes (Kabid Yankes) untuk mempercepat penugasan 392 tenaga medis OAP ke Papua Barat
- Mendampingi OPD kesehatan dalam Musrenbang Otsus agar program kesehatan masuk dokumen perencanaan yang valid
- Monitoring lapangan program MBG: memastikan dapur MBG tidak mengorbankan kesehatan lingkungan masyarakat sekitar
- Advokasi kepada pemerintah pusat untuk alokasi anggaran kesehatan minimum 20% dalam RKPD daerah
- Mendorong implementasi layanan kesehatan bergerak (mobile health) untuk masyarakat adat terpencil di 3T
- Mengawal sinkronisasi data UHC bersama BPJS dan Dukcapil untuk percepatan kepesertaan OAP
- Memfasilitasi koordinasi lintas OPD agar realisasi Dana Otsus kesehatan tidak terhenti di level dokumen

# Pokja REKOMENDASI — PAPUA SEHAT

*Rekomendasi prioritas pembangunan berdasarkan hasil kegiatan dan evaluasi lapangan April 2026.*

**1** Percepat penugasan 392 tenaga medis & kesehatan OAP ke Puskesmas dan RS di seluruh kabupaten Papua Barat

**3** Percepat realisasi Dana Otsus bidang kesehatan — anggaran harus terwujud capaian nyata di lapangan, bukan sekadar dokumen

**5** Standarisasi pemenuhan fasilitas dasar puskesmas: tenaga kesehatan, air bersih, dan logistik obat di seluruh kabupaten

**7** Dukung peningkatan status RS kabupaten dari Tipe D ke Tipe C

**2** Perkuat layanan kesehatan bergerak (mobile health) untuk masyarakat adat di daerah 3T dan pedalaman

**4** Dorong percepatan implementasi UHC melalui sinkronisasi data BPJS–Dukcapil untuk seluruh OAP Papua Barat

**6** Evaluasi dan tingkatkan insentif tenaga kesehatan di daerah 3T agar retensi dan kinerja meningkat

**8** Pastikan alokasi anggaran kesehatan minimum 20% dalam RKPD 2027 seluruh kabupaten/kota Papua Barat

# Kesimpulan & Rekap Kegiatan

Sepanjang April 2026, BP3OKP Perwakilan Papua Barat melaksanakan 16 kegiatan strategis di seluruh aspek pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

## Aspek Perencanaan

- Musrenbang Otsus Peg. Arfak (1 Apr)
- Rakor Dana Otsus Papua Barat (8 Apr)
- Raker Pemprov + Bupati (16 Apr)
- Sinkronisasi Gubernur (20 Apr)
- Musrenbang Otsus Teluk Bintuni (23–24 Apr)
- Desk Musrenbang Bintuni (24 Apr)
- Musrenbang Otsus Teluk Wondama (24–25 Apr)

## Aspek Penganggaran

- Penugasan Tenaga Medis OAP (Apr)

## Aspek Pelaksanaan

- Audiensi PKBM Rumbai Koteka (10 Apr)
- Tinjauan Lapangan PKBM (11 Apr)
- Monitoring Dapur MBG (13 Apr)
- Forum Ekonomi Papua Barat (15 Apr)
- Kunjungan Pengungsian Muskona (25 Apr)

## Aspek Penatausahaan

- Rapat Persiapan Internal Audiensi Gubernur (9 Apr)

Kelompok Kerja (Pokja)

# Papua Sehat

---

Kelompok Kerja Papua Sehat — BP3OKP Papua Barat

*Sasaran Misi: "Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk Papua Barat"*

# Laporan Bulanan Pokja Polhukam

APRIL 2026



13 APRIL 2026

## Permasalahan

1. Terjadi pencemaran air sungai, polusi udara, yang mengganggu mahasiswa/i yang menggunakan rumah pos yang berdekatan dengan pengelola dapur MBG yang tidak berwawasan lingkungan.
2. Belum adanya studi kelayakan tentang persyaratan berdirinya suatu dapur pengelola MBG bagi siswa-siswi di Manokwari yang diawali juga dengan kajian amdal.
3. Dengan adanya pencemaran air sumur dan polusi udara maka banyak mahasiswa yang keluar dari tempat kos berimplikasi pada pertengkaran tetangga antara pengelola dapur MBG dan pemilik rumah kos.

## Kegiatan

1. Pertemuan dan koordinasi antara anggota pokja papua cerdas, sehat, produktif dan polhukan yang dikordinir pokja papua cerdas untuk melakukan pertemuan lanjutan dengan pemilik rumah kos yang terletak di belakang masjid amban.
2. Anggota pokja BP3OKP melakukan sosialisasi kepada pengelola dapur MBG tentang persyaratan berdiri atau dibentuknya dapur MBG
3. Saran usul dari anggota pokja BP3OKP kepada pengelola agar patuh terhadap prinsip dan ketentuan yang ditetapkan sebagai pedoman pengelolaan MBG agar tidak berdampak hukum dan pencemaran lingkungan.

## Rekomendasi

1. Agar tidak terjadi pertikaian yang panjang maka disarankan penolah dapur MBG dapat mencari tempat yang baru sesuai ketentuan peraturan pengelolaan MBG agar tidak memngganggu lingkungan sosial dan pencemaran lingkungan
2. Diperlukan kajian amdal terkait kelayakan dapur MBG di lingkungan sosial diharapkan lebih berwawasan lingkungan demi menghindari polusi udara, tertampungnya limbah cair dan padat yang mengotori dan mengganggu Kesehatan lingkungan masyarakat setempat
3. Diperlukan adanya kewajiban bahwa setiap pengelola dapur MBG memiliki sertifikasi amdal



## Permasalahan

1. Belum adanya penjelasan dari OPD teknis yang menangani perekonomian daerah terkait dengan kebutuhan anggota dan kelompok pengusaha OAP, yang mengakibatkan kurangnya perhatian pembinaan terhadap pengusaha OAP.
2. Atas inisiatif pengusaha OAP telah membentuk suatu organisasi yang diberi nama forum ekonomi papua barat produktif dan perdamaian yang mengharapkan adanya bantuan pembinaan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten namun dalam perencanaan guna pelaksanaannya belum menjadi perhatian serius opd teknis yang melaksanakan tugas perekonomian di daerah.

## Kegiatan

1. Telah dilakukan rapat koordinasi antara BP3OKP provinsi papua barat dengan pengusaha OAP dalam FGD forum ekonomi papua barat produktif dan perdamaian yang diselenggarakan di ruang rapat kasuari GKN Lt 3.
2. Narasumber di FGD ini adalah Ibu irene Manibuy S.H M.Kn dari BP3OKP Perwakilan provinsi papua barat, Lefinus Wanggai S.E, dari forum ekonomi papua barat produktif dan perdamaian.
3. Dalam diskusi sangat mendapat respon positif dari peserta diskusi yaitu pihak perbankan, pejabat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang diundang untuk memberikan pencerahan dan Informasi ekonomi

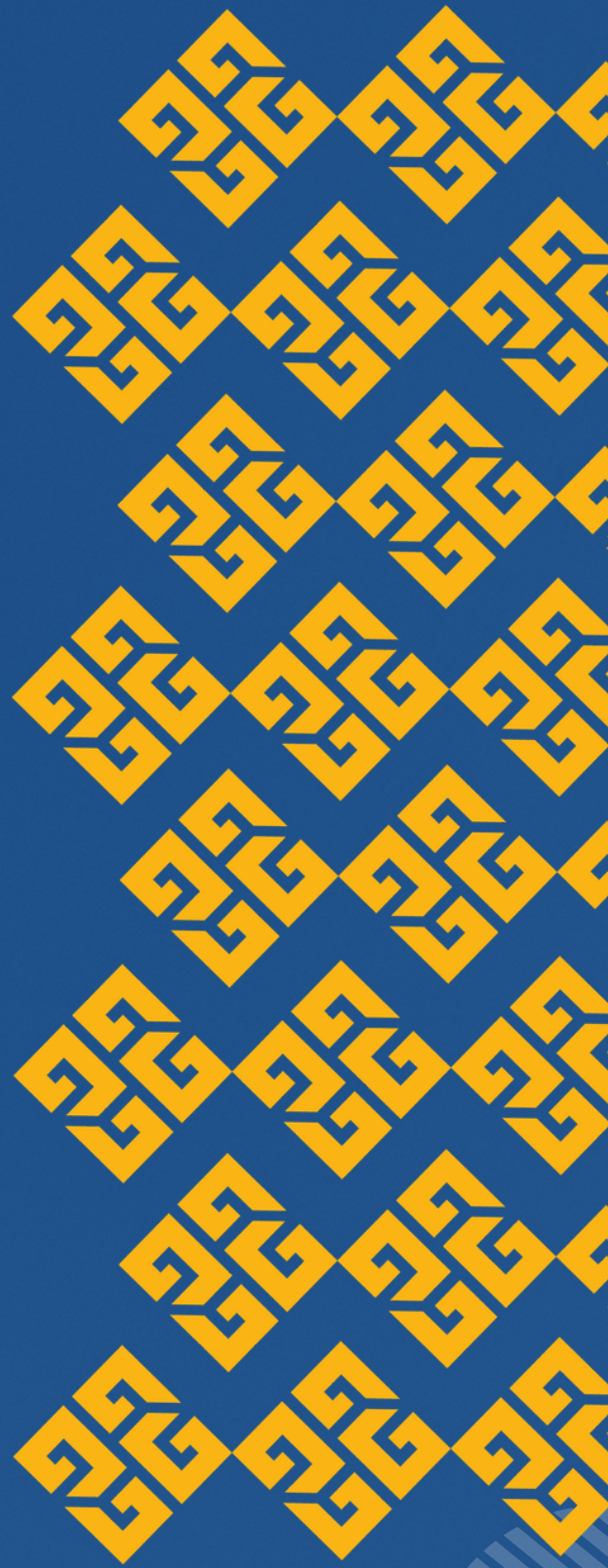


## Rekomendasi

1. Diharapkan adanya perhatian pemerintah daerah provinsi dan kabupaten terhadap pengusaha OAP yang telah berusaha dibidang ekonomi namun terbatas keuangan untuk pengembangan usahanya
2. Disarankan kepada pihak perbankan diharapkan agar membantu permodalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pengusaha OAP agar mereka dapat berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan ekonomi kreatif

# Pokja Polhukam

## APRIL 2026





# LAPORAN BULANAN

## KELOMPOK KERJA PAPUA PRODUKTIF

### PERIODE APRIL 2026

**Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua  
Perwakilan Provinsi Papua Barat**



# PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas Berkat dan PerkenanNya sehingga laporan kerja bulanan Pokja Papua Produktif pada BP3OKP-RI Kantor Perwakilan Provinsi Papua Barat dapat disusun dan selesai tepat pada waktunya.

Laporan bulanan laporan kerja Pokja Papua Produktif Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pencapaian sasaran sinergi selama Bulan April 2026. Laporan ini mendeskripsikan tentang tugas dan fungsi Pokja Papua Produktif yang terakomodir dalam perencanaan strategis, visi-misi, tujuan dan sasaran kegiatan, kebijakan, program, termasuk permasalahan yang dihadapi dan upaya tindaklanjut pemecahan masalah.

Kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka sangat diharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik konstruktif untuk perbaikan laporan lebih lanjut.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua teristimewa kami di jajaran Pokja dan Sekretariat BP3OKP serta setiap pembaca yang mulia.

**Manokwari, April 2026**

Hormat Kami  
Pokja Papua Produktif

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Tugas dan fungsi Pokok BP3OKP adalah melakukan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dengan Kementerian/Lembaga secara vertikal dari pusat sampai daerah termasuk distrik dan kampung. BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat berdasarkan Sistem Perencanaan Nasional dan Daerah berperan sebagai **Media Utama** untuk mengarahkan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar sinergi dan serasi dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004*. Dalam pelaksanaan tugas BP3OKP untuk mengawal Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus di bidang Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif sesuai amanat Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang diatur dalam Perpres No 24 Tahun 2023, maka tugas Pokja Papua Produktif selalu mendampingi dan berkoordinasi dengan Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua dan Polhukam terutama mengenai bidang tugas dari ketiga pokja tersebut yang akan bersentuhan dengan masalah kesejahteraan dalam hal ini terutama dari ketiga pokja dimaksud berkaitan dengan Pembentukan Kawasan Tentang Kiprah Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif.

Selama perjalanan pemerintahan dan pembangunan pada bulan April tahun 2026, Pokja Papua Produktif hanya menitikberatkan pada kesejahteraan guna meningkatkan dan perbaikan kebutuhan serta ekonomi masyarakat Papua Barat khususnya Orang Asli Papua (OAP), yaitu mendampingi serta merealisasikan dan mensosialisasikan amanat kebijakan Undang-Undang No 21 Tahun 2021 Pasal 47 tentang Pengawasan Sosial oleh masyarakat terhadap Pelaksanaan Otonomi Khusus, dan Peraturan Pemerintah No 107 Tahun 2021 Pasal 47 yang mengamanatkan Peran serta Masyarakat dalam Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus. Disisi lain Pokja Papua Produktif juga terlibat di dalam setiap Forum Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh pokja lainnya dan menjelaskan kepada pemerintah daerah melalui pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat tentang pentingnya sinergitas dan kerja sama Kementerian/Lembaga Non Kementerian seperti BPKP, BPK, KPK, Kejaksaan, Pemerintah Daerah/APIP, Ombudsman, DPRD/DPRK, Perguruan Tinggi Negeri dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang dikoordinir oleh BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat.

Output daripada kinerja Pokja Papua Poroduktif Bersama pokja lainnya telah memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat tentang tata cara penerimaan dan penggunaan dana Otsus. Disisi lain output yang dihasilkan Pokja Papua Produktif terkait dengan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Teluk Wondama memberikan pemahaman kepada pimpinan OPD dalam perencanaan program dibidang pemberdayaan masyarakat.

Demikian diskripsi ringkasan eksekutif (eksecutive summary) Pokja Papua Produktif yang disampaikan untuk diketahui dan di mohon petunjuk lebih lanjut

# Pendahuluan

Perpres No 121 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) terdiri dari 4 (empat) Pokja, yaitu Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif dan Papua Pohukam (Papua Damai). Keempat Pokja tersebut melaksanakan tugas dan fungsi pokok BP3OKP, yaitu Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Otonomi Khusus yang bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan antar daerah dan kesenjangan sektor demi terwujudnya orang Papua yang sejahtera dan mandiri. Untuk mencapai tujuan Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud, maka BP3OKP melalui kerja-kerja Pokja telah membangun koordinasi dan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan setiap kabupaten di wilayah kerja Provinsi Papua Barat untuk bersama-sama mendorong proses percepatan pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2021 Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Berdasarkan peraturan perundang undangan dimaksud maka BP3OKP telah melaksanakan fungsinya dan secara operasional dilakukan oleh setiap kelompok kerja (Pokja) dan melalui kesempatan ini Pokja Papua Produktif akan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas Bulan April untuk dijadikan data dan informasi kinerja pelaksanaan Kelompok Kerja Papua Produktif untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

# Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi BP3OKP didasarkan pada Perpres No. 121 Tahun 2022. Khusus untuk tugas pokok dan fungsi Pokja Papua Produktif, dapat dideskripsikan sebagai berikut :

## 1. Tugas

- > Mendorong semangat Otonomi Khusus melalui pelaksanaan demokrasi yang berkeadilan, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap orang dalam pelaksanaan Otonomi Khusus;
- > Bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan **Desentralisasi Asimetris** untuk mewujudkan kekhasan daerah, karakteristik daerah dan kekhususan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;
- > Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga terkait di Kesejahteraan masyarakat;
- > Melaksanakan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan pendampingan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) demi mensejahterakan masyarakat dan pemerataan ekonomi;
- > Melakukan pemantauan dan asesmen terhadap kinerja pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan Otonomi Khusus;
- > Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kawasan yang disiapkan oleh daerah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus terkait dengan Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Polhukam;
- > Mendukung dan mendorong program kerja Pemerintah daerah di bidang peningkatan ekonomi masyarakat.

## 2. Fungsi

- > Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terhadap kebijakan program pelaksanaan Otonomi Khusus;
- > Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta kelembagaan yang berada dalam masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penggunaan dana Otsus bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola dana tersebut;
- > Menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas Pokja Papua Produktif kepada Pimpinan BP3OKP untuk diteruskan pada Presiden melalui Wakil Presiden.





Rabu, 01 April 2026



Aula Yosmar Perkantoran Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf)



**Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Pegunungan Arfak.** Kegiatan dihadiri langsung oleh Kepala BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Papua Barat, Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak dan para Muspida di lingkup Kabupaten Pegunungan Arfak. Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) merupakan kabupaten yang pertama di Provinsi Papua Barat menggelar Musrenbang Otsus dan RKPD Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2027. Sebuah pencapaian yang mendapat apresiasi dari Kepala BP3OKP Perwakilan Papua Barat, Irene Manibuy. Rapat berlangsung dalam dua sesi, yaitu arahan kebijakan Otsus oleh BP3OKP serta sesi Pemaparan program oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui forum DESK. **Kepala BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat menyampaikan arahan bahwa Dana Otsus bukan sekadar anggaran yang diberikan negara, melainkan instrumen keberpihakan negara kepada Papua khususnya masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang berada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan bukan seberapa besar anggaran yang diserap, melainkan seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Pegunungan Arfak terutama Orang Asli Papua (OAP). Empat arah kebijakan yang ditekankan Kepala BP3OKP : Memprioritaskan masyarakat Orang Asli Papua (OAP), Menggunakan pendekatan berbasis data (bukan kira-kira), Sinkronisasi program kerja dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) antara Nasional dan perencanaan di tingkat Daerah serta Jaminan transparansi dan akuntabilitas.**

Selain itu, sambutan Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) Dominggus Saiba menjelaskan kondisi Kabupaten Pegaf sebagai satu dari 30 daerah yang masuk kategori 3T (terluar, tertinggal, terdepan) di Indonesia, dengan berbagai inisiatif yang sedang berjalan: program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di tiga lokasi, pembebasan lahan sekolah rakyat (8 ha di Seba, siap bangun), program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang terkendala keterbatasan anggaran, serta kebutuhan infrastruktur tiga jembatan gantung dan jalan penghubung daerah produksi ke pasar. Forum Desk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghasilkan paparan komprehensif dari Dinas Kesehatan (darurat kesehatan: harapan hidup OAP (rencana rekrut 2 tenaga dokter spesialis), Dinas Pendidikan (sekolah Sepanjang Hari/SSH, Paket A/B/C, kamus bahasa daerah, kerja sama UNICEF, Institut Satu Pegaf), Kepolisian (kebutuhan barak 273 personel), dan Dinas Perumahan (program 3 juta unit). Rapat ditutup dengan komitmen kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sebagai modal utama pembangunan berkelanjutan di kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf).



08 April 2026



Ruang Rapat BP3OKP Lantai III, Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari

Pertemuan antara Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua Republik Indonesia (BP3OKP-RI) Provinsi Papua Barat bersama Biro Administrasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. ***Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Bersama Kementerian terkait tanggal 25 - 26 Maret 2026. Pertemuan di Jakarta membahas Tata Kelola, Kewenangan Kelembagaan, Perencanaan, serta Pengawasan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) di Provinsi Papua Barat. Rapat juga menyorot kebutuhan mendesak akan sinkronisasi antar-institusi, penguatan mekanisme anggaran, serta langkah-langkah konkret untuk memperkuat peran Biro Otsus dan lembaga pengawas dalam Ekosistem Tata Kelola Dana Otsus.*** Pertemuan antara BP3OKP Bersama Biro Otsus Papua Barat tentang ketidakjelasan alokasi dan nomenklatur program Otonomi Khusus (Otsus) dalam Sistem Perencanaan Daerah. Banyak program yang seharusnya teridentifikasi sebagai program Otsus justru masuk sebagai kegiatan koordinasi tanpa nilai anggaran yang nyata dan terukur. Permasalahan ini disebabkan oleh perubahan nomenklatur berdasarkan Permendagri dan Peraturan Pemerintah terbaru, selain itu komunikasi yang kurang efektif antara Biro Otsus, Bappeda, dan para Pimpinan Daerah, sehingga program-program strategis tidak di anggarkan sebagaimana mestinya.

Pertemuan tersebut melahirkan beberapa kesepakatan yaitu Melakukan klarifikasi nomenklatur kepada Pemerintah Pusat yakni Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (kemenkeu), Melaksanakan verifikasi alokasi di Bappeda agar porsi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku serta Mendokumentasikan seluruh perubahan nomenklatur sebagai bahan rekonsiliasi anggaran. Pertemuan tersebut juga membahas Kewenangan, Peran, dan Koordinasi Antar-Institusi yaitu menyoroti permasalahan ketidakjelasan pembagian tugas antara Biro Otsus, Bappeda, Inspektorat, dan Biro Pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan fungsi perencanaan, penganggaran, dan pengawasan sering tumpang tindih, dilain sisi, Biro Administrasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) hanya menjadi entitas birokratis tanpa kewenangan implementasi yang nyata. Tanpa pembagian tugas dan alur yang jelas, Biro Otsus tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan dan monitoring-evaluasi secara efektif, karena otoritas pelaksanaan banyak berada di OPD lain dan Bappeda.



***09 April 2026 bertempat di Sekretariat BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat, Lantai III Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari, dilaksanakan pertemuan antara BP3OKP-RI Papua Barat yakni melalui Pokja Papua Produktif dan Pokja Papua Sehat bersama Ketua Forum Ekonomi Papua Produktif dan Perdamaian.*** Pertemuan tersebut membahas persiapan internal dalam rangka menyinkronkan seluruh pemangku kepentingan yang akan disampaikan oleh Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat yakni Gubernur Dominggus Mandacan, M.Si. Adapun target yang harus dicapai adalah diharapkan Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat memberikan dukungan nyata terhadap Program Pembangunan Kampung Ekonomi Papua Produktif. ***Pertemuan juga membahas Kondisi dan situasi terkini di Papua Barat, mencakup situasi ekonomi yang sedang dirasakan masyarakat Papua Barat khususnya Orang Asli Papua (OAP). Selain itu berbagai macam potensi unggulan daerah yang bisa diolah/diproduksi menjadi sesuatu yang sangat bernilai ekonomis. Kehadiran Forum Ekonomi Papua Produktif sebagai platform koordinasi pembangunan ekonomi daerah serta Pelaporan dua program unggulan***

Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian: yakni Kartu Papua Barat Produktif beserta skema pembiayaan dan distribusinya dan Program Pembangunan Kampung Ekonomi Papua Produktif. ***Pokja Papua Produktif juga menekan bahwa Implementasi program dilakukan secara bertahap, tidak membatasi cakupan pada satu lokasi/program; mengembangkan secara paralel, Membangun jaringan kerja (network) yang solid dengan berbagai pemangku kepentingan, memrioritaskan perencanaan yang matang dan berbasis data sebelum eksekusi serta fokus pada pangan lokal/komodity lokal harus berbasis pasar lokal. Selain itu Pokja Papua Produktif juga memberika arahan bahwa penting untuk mengidentifikasi program berdasarkan target penerima manfaat melalui Program yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat., Program yang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga tingkat pusat, skema pembiayaan. program.***



10 April 2026



Ruang Rapat BP3OKP Lantai III, Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari



Pertemuan antara BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat bersama Yayasan Kasih Rumbai Koteka Papua Barat yang juga diketuai oleh salah satu anggota Pokja Papua Cerdas di BP3OKP Papua Barat, yaitu Bapak Ayub Msiren, SE. Turut hadir Instansi Polda Papua Barat yang menaungi Proses Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM). Selain itu Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Kesbangpol Papua Barat, Biro Otsus dan Bappeda Papua Barat. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BP3OKP-RI Papua Barat, Ibu Irene Manibuy, SH.,M.Kn. ***Dalam arahannya beliau menyampaikan bahwa program ini adalah bukti nyata keberpihakan terhadap masyarakat Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Barat. Ia menambahkan program penyaluran lulusan Paket Pendidikan A,B, dan C dengan fokus pada peningkatan mutu, pengawasan kurikulum, dan kolaborasi multi-stakeholder untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif dan siap kerja. Sehingga diharapkan dengan ijazah tersebut masyarakat bisa melamar pekerjaan baik sebagai tenaga Satpam maupun karyawan pada Perusahaan. Tujuannya dapat menciptakan lapangan pekerjaan guna bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program ini sejalan dengan visi pembangunan Papua Barat yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih sehat, cerdas, produktif mandiri dan bermatabat.***



**11 April 2026 BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat** mengunjungi peserta Ujian Paket C yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dibawah Yayasan Kasih Rumbai Koteka Papua Barat. Turut hadir DirBinmas Polda Papua Barat, Pokja Papua Produktif, Pokja Papua Cerdas. ***Dalam kunjungan tersebut Kepala BP3OKP-RI Papua Barat, Irene Manibuy, SH.,M.Kn mengungkapkan, banyak peserta yang mengikuti program tersebut berasal dari berbagailatarbelakang, termasuk mereka yang terpaksa berhenti sekolah karena masalah pribadi maupun keluarga.*** Kepala BP3OKP Papua Barat juga menekankan bahwa ada yang tidak bisa lanjut sekolah karena hamil saat masih duduk di bangku SMP atau SMA. ***Dengan kehadiran Ujian Paket A, B, dan C ini membantu siswa mendapatkan Ijazah mencari lapangan pekerjaan. BP3OKP Papua Barat mendorong pemerintah daerah agar mengalokasikan Dana Otonomi Khusus untuk mendukung pendidikan nonformal tersebut. Selain itu Kepala BP3OKP Papua Barat menyarankan ada kurikulum yang tidak hanya memberi ijazah, tetapi juga keterampilan kerja dan pembentukan karakter. BP3OKP bersama Polda Papua Barat dan Yayasan Kasih Rumbai Koteka berupaya menjalin kerja sama dengan dunia usaha menyalurkan tenaga kerja. Dukungan BP3OKP dan Polda Papua Barat sangat dibutuhkan perannya untuk mencegah minimnya SDM dan menciptakan lapangan kerja. Kehadiran Anggota BP3OKP, merupakan sinyal positif serta harapan dalam upaya bersama mengentaskan angka putus sekolah hingga buta tulis dan baca. Upaya mencari kehidupan yang layak di dunia industri seperti jasa pengamanan bagi lulusan sekolah paket dan lain-lain.***

***BP3OKP juga mengemban visi Orang Papua harus mandiri, sejahtera dan berkeadilan dengan misi Orang Papua yang sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif dan Papua Polhukam, yang sedang diselenggarakan oleh Yayasan Rumbai Koteka adalah bagian dari Papua Cerdas tugas yang sangat mulia. Misi ini tidak hanya pada sekolah Formal tetapi juga yang diselenggarakan***

***oleh Yayasan tersebut.*** Lewat BP3OKP yang diketuai oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sangat berharap apresiasi dan upaya yang di bangun selama ini oleh pihak Yayasan Kasih Rumbai Koteka kalangan perempuan mengalami masalah yang nyaris sama, seperti hamil saat duduk di bangku sekolah. Masyarakat Ketika mendengar ada ruang untuk memperoleh ijazah, mereka justru bersemangat mendaftarkan diri, apalagi belajar di sini hingga tamat tidak dipungut biaya. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, tugas BP3OKP adalah di mana ada dana Otsus diturunkan maka peran BP3OKP wajib mendorong belajar tulis baca hitung bagi kami punya orang-orang Papua, baik yang berusia wajib sekolah maupun yang putus sekolah. ***Kegiatan tersebut juga bertujuan menangani kesenjangan sosial dikalangan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Papua Barat yang Cerdas sehingga bisa berproduktif, mandiri dan berdaya saing.***



**13 April 2026 BP3OKP-RI Papua Barat** melakukan kunjungan ke salah Satu Dapur pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Upaya tersebut sebagai Tindaklanjut atas laporan dari salah satu warga yang dinilai dirugikan atas kehadiran dapur MBG tersebut. Pada dasarnya ia sangat mendukung Program Strategis Nasional (PSN) berupa kehadiran MBG, namun jika dalam prosesnya memberikan dampak buruk bagi warga maka hal tersebut harus cepat diselesaikan. Warga menilai lokasi Dapur MBG sangat berdekatan dengan rumah mereka sehingga pencemaran berupa asap yang ditimbulkan oleh aktivitas dapur tersebut sangat mengganggu warga. Dampaknya beberapa anak kos yang menyewa di rumah tersebut pindah akibat mereka tidak menahap apa yang dirasakan. Selain mendengar keluhan warga, Anggota Pokja BP3OKP secara langsung meninjau pembangunan dapur MBG. ***Dalam pengamatannya Pokja Papua Produktif menilai bahwa dapur tersebut sangat berdekatan bahkan berhimpit dengan rumah warga. Sebab lokasi Dapur MBG berada di tengah pemukiman warga. Selain itu masih terdapat pengerjaan berupa bak penampungan air oleh aktivitas yang akan diproduksi menggunakan teknologi untuk kemudian air tersebut Kembali digunakan. BP3OKP juga bertemu dengan pengelola Dapur MBG dalam pertemuan tersebut, si Pihak pengelola dapur menyampaikan bahwa memang ada dampak oleh air sumur namun sudah dilakukan perbaikan sehingga warga yang menjadi dampak tersebut sudah bertemu dan menyampaikan terima kasih. Namun dampak berupa asap dan hawa panas yang ditimbulkan sudah diperbaiki. Namun yang menjadi persoalannya adalah Dapur MBG prosesnya sudah hampir 1 Tahun, sehingga selama ini warga yang terdampak melakukan apa saja. Anggota BP3OKP setelah mendengar apa yang disampaikan oleh kedua belah pihak akan melakukan evaluasi dengan menghadirkan Koordinator MBG baik di Provinsi maupun Kabupaten.***



15 April 2026, bertempat di Aula Kasuari lantai III, Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari Provinsi Papua Barat dilaksanakan Audiensi antara BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian. Forum ini merupakan sebuah Langkah dan upaya strategis yang dibentuk pada Bulan Desember Tahun 2025 sebagai tindak lanjut atas kunjungan Wakil Presiden RI, Bapak Gibran Raka Buming Raka di Provinsi Papua Barat khususnya di Ibu Kota Kabupaten Manokwari. Pertemuan Wakil Presiden Republik Indonesia yang secara langsung berinteraksi dengan para pengusaha. Dalam rapat tersebut membahas dalam rangka memastikan efektivitas implementasi Otonomi Khusus Papua yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat serta selaras dengan visi Papua Emas 2041, di perlukan Langkah-langkah strategis serta upaya terobosan yang terukur terintegrasi dan kolaboratif. **Forum Ekonomi Papua Barat Produktif Dan Perdamaian, di bawah pengawasan BP3OKP RI- Perwakilan Provinsi Papua Barat menginisiasi Grand Desain Pilot Project, yakni: “Kawasan Terpadu Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian” sebagai model akselerasi Pembangunan ekonomi berbasis potensi local yang siap di implementasikan dan direplikasi secara luas. Oleh karena itu, BP3OKP - RI/BPP Provinsi Papua Barat memandang perlu untuk mengundang semua Stakeholders dalam kajian bersama melalui Forum Focus Group Discussion (FGD). Pertemuan Bersama dengan pimpinan OPD Provinsi Papua Barat dan perwakilan Bank Papua juga membahas bahwa Gubernur Provinsi Papua Barat telah mengalokasikan Rp 50 miliar masing-masing untuk program Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Forum ini bertujuan mengoordinasikan OPD, Bank Papua, dan pelaku ekonomi lokal untuk menggerakkan ekonomi Papua Barat secara konkret. BP3OKP Papua Barat menyampaikan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat Orang Asli Papua (OAP) melalui wadah kolaborasi antar pelaku usaha yang difasilitasi dalam Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian. Selain menjadi ruang diskusi, forum ini juga bertujuan merumuskan langkah-langkah terobosan yang terukur, terintegrasi dan kolaboratif guna memastikan implementasi otonomi khusus benar-benar berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat. Program tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang Papua Emas 2041. Kepala BP3OKP menjelaskan bahwa forum tersebut telah memiliki legalitas dan berada di bawah koordinasi BP3OKP sehingga dapat menjadi jembatan kerja sama antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait. Dalam forum tersebut, para pelaku usaha juga didorong untuk melakukan pendataan usaha secara jelas, mulai dari jenis usaha, lokasi usaha hingga identitas pelaku usaha. Pendataan ini penting agar para pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses dukungan pemerintah maupun fasilitas perbankan.**





Kamis, 16 April 2026 dilaksanakan Rapat Kerja (Raker) Bupati Se-Provinsi Papua Barat Tahun 2026 bertempat di aula Aston Niu Hotel, Manokwari. Dalam Arahannya Kepala BP3OKP/BPP-RI Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy mengatakan bahwa semua kabupaten sudah harus melaksanakan Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan Musrenbang yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten harus secepatnya sebelum Musrenbang Otsus dan RKPD Provinsi Papua Barat. Dalam arahannya beliau menekankan bahwa kegiatan Musrenbang perlu Melibatkan Anggota DPRP Papua Barat dan DPRP Pengangkatan (Otsus) serta Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat. ***Penyusunan program di kegiatan Musrenbang harus selaras dengan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) untuk mencapai Papua Emas 2041, sistemnya ada pada Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP). Jika program yang disusun/diusul tidak sesuai dengan kedua document tersebut, maka secara otomatis sistem akan menolak.. Rapat Kerja Bupati se-Papua Barat juga menyepakati beberapa hal, yaitu :*** Pemerintah Provinsi dan Kabupaten menyiapkan data terkait pemekaran wilayah kampung distrik dan kabupaten untuk bersma sama melakukan audiensi dengan pemerintah pusat, Penyelesaian tapal batas wilayah antar provinsi serta batas wilayah antar kabupaten yang besinggungan terutama Kabupaten Teluk Bintuni-Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari-Kabupaten Tambrauw sehingga menganggarkan pelaksanaan melalui APBD, Pemerintah kabupeten se Papua Barat telah bersepakat mengembalikan urusan dan kewenangan pendidikan SMA/SMK dan P3D bidang pendidikan dari kabupaten kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat yang selanjutnya akan di bahas di Kementerian Dalam Negeri serta dalam rangka konektivitas antar daerah, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan kabupaten sepakat meningkatkan Kapasitas Bandara Rendani Manokwari sebagai bandara Internasional dan juga mengembangkan bandara-bandara disetiap kabupaten untuk menjadi landasan yang memenuhi standar penerbangan.

***Gubernur Papua Barat menekankan bahwa pemerataan pembangunan menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Masih ada kesenjangan antarwilayah, baik disis infrastruktur, pelayanan Pendidikan,dan Kesehatan maupun akses terhadap peluang ekonomi. Selain itu keberhasilan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, penurunan angka kemiskinan, perluasan akses layanan dasar serta terciptanya lapangan kerja yang berkelanjutan. Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Papua Barat menyampaikan bahwa Wilayah Strategis Kawasan Indonesia Timur yang memiliki kekayaan sumber alam yang melimpah keanekaragaman hayati yang sangat tinggi serta memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, namun dibalik potensi tersebut terdapat berbagai tantangan structural yang dihadapi. Ia menambahkan luas wilayah yang besar, kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur dasar serta penyebaran penduduk yangh belum merata menjadi tantangan serius dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerja Bersama diseluruh jajaran pemerinta baik Provinsi maupun Kabupaten***



Senin, 20 April 2026 Rapat Sinkronisasi, Harmonisasi Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) antara BP3OKP/BPP-RI Papua Barat, Kanwil Keuangan Papua Barat Serta Gubernur Provinsi Papua Barat, Bapak Drs. Dominggus Mandacan, M.Si. ***Pada sesi kesempatannya Pokja Papua Produktif Drs. Lalu Suprpta menyampaikan beberapa hal sebagai upaya tindak lanjut atas pertemuan dengan Ketua Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian serta rangkaian kegiatan Forum Group Discussion (FGD) di Sekretariat BP3OKP Papua Barat pada beberapa waktu lalu. Pokja Papua Produktif menyampaikan 3 (tiga) produk utama yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua Barat, yaitu : Komunitas Unggulan, perkembangan pariwisata rintisan dan Ketahanan pangan berupa bio ethanol. BP3OKP Sudah diskusi Dengan LSM terkait pengolahan singkong untuk produksi bio ethanol. Adapun bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi prodak bio ethanol adalah singkong maka akan di usahakan atau pembangunan industri singkong. Pembangunan industrioethanol tidak serta merta melainkan butuh waktu selama 2 tahun. Selain itu Kakao di Kabupaten Mansel sudah mendapatkan pasar Luar negeri sehingga masyarakat dapat diberdayakan. Papua produktif juga menyampaikan dibidang perkebunan seperti Sawit yang Perkembangan menurun kelapa sawit karna harusnya memiliki kebun inti. Juga perkebunan yang Kopi memiliki potensi besar terutama di Pegaf. Sangat sulit dikembangkan karna masyarakat belum secara sepenuhnya produktif dan lahan yang masih sedikit digunakan. Dibidang perikanan potensi perikanan di laut Sudah ada program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia dan telah selesai melakukan kunjungan turun serta membangun kampung nelayan Modern terutama mereka harus mencari kelompok nelayan. Ada 8 lokasi yg sdh direncanakan untuk dibangun kampung nelayan Modern sehingga bisa di dukung terutama pembangunan industri maupun fasilitas lainnya serta pasar. Program pemerintah saat ini Sudah sangat baik sehingga Perlu mendapatkan perhatian dan apresiasi dari semua kalangan.*** Pariwisata rintisan harus didukung. Seperti di Amban Pantai yan memiliki potensi untuk Mendapatkan PAD baik segi wisata maupun UMKM lainnya. Di kabupaten Kaimana pengembangan potensi Pariwisata Dengan membangun SMK atau sekolah pariwisata.



Kamis, 23 April hingga Jumat, 24 April 2026 BP3OKP-RI/BPP Provinsi Papua Barat melalui Pokja Papua Produktif dan Papua Cerdas menghadiri kegiatan Musrenbang Otsus dan RKPD Tahun 2027 di Kabupaten Teluk Wondama. Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), Ketua DPRK, Ketua Klasis dan Wakapolres mendampingi Bupati Teluk Wondama, Elysa Auri, SE, MM secara resmi membuka kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Otonomi Khusus (Otsus), dan Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2027. Pembukaan ditandai dengan tradisi penaburan tifa sebanyak tiga kali sebagai simbol dimulainya kegiatan. Acara berlangsung di Gedung Sasana Karya Perkantoran Isey Rasiei. **Kegiatan Musrenbang mengusung tema "Penguatan Transformasi Pembangunan Daerah Melalui Peningkatan Kualitas SDM, Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Lokal, dan Penguatan Identitas Wondama Sebagai Pusat Peradaban Pendidikan Papua. Bupati Elysa Auri menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang untuk memajukan daerah. Forum ini menjadi wadah strategis bagi seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan program dan kegiatan, baik yang bersumber dari dana umum maupun dana Otsus, demi mewujudkan visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala OPD, jajaran pemerintahan, serta stakeholder terkait yang akan mendiskusikan dan merumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Teluk Wondama untuk tahun mendatang.**

**Dalam sambutannya Bupati Teluk Wondama mengatakan ada empat fokus yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik agar pelaksanaan pada tahun mendatang lebih tepat sasaran. Fokus pertama meliputi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan aparatur pemerintah. Fokus kedua, pengembangan ekonomi produktif yang memanfaatkan potensi lokal. Fokus kedua itu nantinya mengarah kepada hilirisasi, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan. Fokus yang ketiga menyorot pada penguatan identitas Teluk Wondama sebagai pusat peradaban pendidikan di Tanah Papua melalui pengembangan nilai sejarah, adat dan budaya. Keempat, peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Penetapan empat fokus program pembangunan tidak terlepas dari kemampuan finansial pemerintah daerah yang terbatas, namun tidak mengabaikan kualitas dan mutu penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.**



Jumat, 24 April 2026 bertempat di Gedung Sasana Karya, SP3

Manimeri, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, yakni 23-24 April 2026 itu menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah, DPRK, MRPB, OPD, hingga berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun arah pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni ke depan. Dalam forum tersebut, lahir tiga desk perhatian khusus pembangunan daerah, yakni Papua Produktif, Papua Cerdas, dan Papua Sehat, yang menjadi fokus utama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya Bupati Teluk Bintuni menekankan lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu : **Pertama** seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan diminta menjadikan hasil Musrenbang sebagai rujukan utama dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran. Setiap program harus berbasis data, konsisten dengan prioritas yang telah disepakati, serta memiliki indikator kinerja yang jelas. **Kedua implementasi program kerja harus selaras dengan tema pembangunan tahun 2027, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industry. Ia menambahkan pembangunan daerah tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan semata, tetapi harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Fokus pembangunan daerah bukan sekadar pertumbuhan, tetapi pertumbuhan yang memberi nilai tambah, memperkuat daya saing daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan serta menyentuh masyarakat. Ketiga** bupati meminta seluruh perangkat daerah memastikan keterpaduan perencanaan lintas sektor, menghindari duplikasi kegiatan, serta memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, masyarakat, dan mitra pembangunan. Menurutnya, investasi dan pengembangan sektor industri harus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, hingga kemudahan dalam pelayanan perizinan. Investasi dan pengembangan sektor industri harus didukung oleh peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, serta kemudahan perizinan.

**Keempat hasil Musrenbang harus diselaraskan secara konsisten dengan visi RPJMD 2025-2029, yakni mewujudkan Kabupaten Teluk Bintuni yang Sehat, Energik, Religius, Andal, Smart, dan Inovatif. Ia menegaskan, setiap program pembangunan harus mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat serta mampu diwujudkan secara nyata di lapangan. Setiap program harus mencerminkan nilai-nilai keberpihakan dan mampu mengampu desain kebijakan maupun implementasinya di lapangan. Kelima, Bupati menekankan pentingnya disiplin dalam perencanaan dan evaluasi melalui monitoring berkala agar setiap hambatan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Identifikasi hambatan sejak dini, lakukan langkah korektif secara cepat dan tepat. Akuntabilitas dan transparansi harus menjadi prinsip utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata.**



# Capaian

Pada Bulan April Tahun 2026, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Pokja Papua Produktif mencatat sejumlah capaian kinerja strategis melalui pelaksanaan fungsi SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi), khususnya dalam penguatan perencanaan daerah, koordinasi strategis sesuai misi percepatan pembangunan, serta pengawasan dan harmonisasi lintas sektor dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Beberapa capaian BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat Pokja Papua Produktif pada Bulan April 2026 dari 10 kegiatan adalah antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan kegiatan Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2027, adalah pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak telah menyusun Rencana Program Kerja Tahunan Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2027 sesuai dengan Dokument Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). Serta para pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak sudah memahami Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP).
2. Pada pertemuan yang dilakukan antara Biro Administrasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) dengan BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat yaitu disepakati secara Bersama bahwa perlu dilakukan klarifikasi berupa nomenklatur yang saat ini menjadi persoalan di Biro Otsus. Selain itu tumpeng tindh program yang dinilai oleh Biro Otsus masih terjadi. Ketidakjelasan kewenangan, fungsi dan pelaksanaan program kerja antara Biro Otsus dan Bappeda sehingga kedepan akan ditindaklanjuti
3. Pertemuan antara Ketua Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian bersama BP3OKP-RI Papua Barat membahas penguatan ekonomi masyarakat Probvinsi Papua Barat khususnya Orang Asli Papua (OAP) sehingga telah disepakati program-program apa saja yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat yaitu Gubernur Drs. Dominggus Mandacan, M.Si.
4. Forum yang dilaksanakan antara BP3OKP-RI Papua Barat bersama Yayasan Kasih Rumbai Koteka Papua Barat serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Barat telah melahirkan beberapa gagasan, yaitu : Program Ujian Paket “C” yang dilaksanakan oleh Yayasan Kasih Rumbai Koteka Papua Barat telah memberikan peningkatan mutu bagi peserta didik, memberikan pengawasan kurikulum, dan kolaborasi multi-stakeholder untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif dan siap kerja. Sehingga diharapkan dengan ijazah tersebut masyarakat bisa melamar pekerjaan baik sebagai tenaga Satpam maupun karyawan pada Perusahaan. Hal tersebut juga telah diketahui oleh Pimpinan OPD sehingga kedepan anak-anak maupun masyarakat yang sudah putus sekolah akan lebih diperhatikan
5. Pelaksanaan Ujian Paket C yang dilaksanakan oleh Yayasan Kasih Rumbai Koteka Papua Barat memberikan sumbangsih terhadap mereka yang mau melanjutkan Pendidikan ke jenjang berikutnya. Selain itu Ijazah yang nantinya didapat akan digunakan untuk mencari lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran dan kesenjangan sosial di masyarakat.
6. Telah diketahui penyebab masalah yang dihadapi oleh warga yang terkena dampak dari Dapur MBG. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan menghadirkan Koordinator MBG baik Provinsi maupun Kabupaten.
7. Forum Ekonomi Papua Barat Produktif Dan Perdamaian, di bawah pengawasan BP3OKP RI- Perwakilan Provinsi Papua Barat sudah menginisiasi Grand Desain Pilot Project, yakni: “Kawasan Terpadu Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian” sebagai model akselerasi Pembangunan ekonomi berbasis potensi local yang siap di implementasikan dan direpilkasi secara luas.
8. Capaian berikutnya adalah para Bupati se-Provinsi Papua Barat telah bersepakat mengembalikan Kewenangan Pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dinilai selama ini telah memberatkan Pemerintah Kabupaten dalam pelayanan kesejahteraan Pendidikan terutama guru honor maupun PNS.
9. Ada empat fokus yang menjadi pencapaian bagi Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). **Pertama**, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan aparatur pemerintah. **Kedua**, pengembangan ekonomi produktif yang memanfaatkan potensi lokal. Fokus kedua itu nantinya mengarah kepada hilirisasi, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan. **Ketiga**, menysasar pada penguatan identitas Teluk Wondama sebagai pusat peradaban pendidikan di Tanah Papua melalui pengembangan nilai sejarah, adat dan budaya. **Keempat**, peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
10. Tigal hal yang telah menjadi fokus Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan hasil Musrenbang Otsus dan RKPD yaitu Papua Produktif, Papua Cerdas, dan Papua Sehat guna mendukung Kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang penguatan ekonomi produktif.

# Rekomendasi

Rekomendasi umum berdasarkan capaian antara lain, yaitu Dari 10 jenis item laporan yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1

Disarankan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Gubernur segera menindaklanjuti usulan program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD tahun 2027 maupun kabupaten lain yang masih dalam tahapan Musrenbang Otsus.

2

Biro Administrasi dan pelaksanaan Otsus adalah Biro yang secara langsung berada di bawah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat, sehingga diharapkan urusan seperti ini terlebih dahulu dapat didiskusikan bersama pimpinan maupun Gubernur Provinsi Papua Barat sebagai Eksekutif di daerah pemerintahan.

3

Disarankan Pemerintah Provinsi : Papua Barat yang diinisiasi oleh Gubernur Papua Barat dapat mendorong rencana pembangunan yang diusulkan oleh Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian melalui BP3OKP/BPP-RI Papua Barat khususnya Pokja Papua Produktif

4

Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat terutama para OPD yang mengikuti Forum Diskusi tersebut agar memahami dan menindaklanjuti apa yang menajafi kesepakatan maupun persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang sudah putus sekolah. Salah satunya mengucurkan dana Otsus kepada masyarakat melalui Yayasan tersebut sehingga dapat membantu masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Barat.

5

Guna mendukung pemberantasan kesenjangan sosial dan kemiskinan, masyarakat yang melaksanakan Ujian Paket C diharapkan dapat menggunakan Ijazah tersebut untuk mencari pekerjaan. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi maupun kabupaten melalui dinas Ketenagakerjaan agar dapat membantu masyarakat untuk mencari/menyediakan lapangan pekerjaan baik di Perusahaan maupun sebagai tenaga satoam di Perkantoran.

6

Diharapkan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat, bahwa desain ekonomi yang sudah dibuat oleh Forum segera direalisasikan serta hasil pertemuan dengan BP3OKP-RI segera ditindaklanjuti agar projectnya bisa dibangun dalam jangka waktu dekat.

7

Diharapkan kepada para Bupati se Provinsi Papua Barat agar menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat Bersama Gubernur Provinsi Papua barat

8

Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama agar peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan produg lokal segera ditindaklanjuti sehingga apa yang diharapkan masyarakat Teluk wondama terutama Orang asli Papua (OAP) betul0betul dirasakan.

9

Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam hal Bupati agar segera menindaklanjuti hasil Musrenbang terutama Fokus pada program Papua Produktif.



# PENUTUP



## Penutup

Demikian penyampaian Laporan bulan April 2026 untuk Pokja Papua Produktif BP30KP/BPP-RI Provinsi Papua Barat untuk diketahui dengan harapan adanya respon, petunjuk dan kebijakan lebih lanjut guna pengembangan tugas dan fungsi Pokja Papua Polhukam yang lebih baik serta berimplikasi terhadap program Papua Damai khususnya di Provinsi Papua Barat yang bermartabat, berkeadilan, dan berkelanjutan.



**DRS. LALU SUPRAPTA**  
POKJA PAPUA PRODUKTIF, BP30KP



**VIKTOR TOANSIBA**  
POKJA PAPUA PRODUKTIF, BP30KP



**STAP, ST**  
POKJA PAPUA PRODUKTIF, BP30KP

# Terima Kasih